

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, hanya berkat karunia-Nya Dinas Kelautan dan perikanan telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dan RPJMD Provinsi Jambi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Untuk melanjutkan serta meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2019 ini dapat berjalan sesuai rencana, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Kerja (RENJA) ini dalam pengerjaan cukup banyak keterbatasan yang dialami, untuk itu kami mohon berbagai masukan dan saran guna melengkapi dokumen ini untuk dapat mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mempunyai daya saing komparatif dan kompetitif.

Jambi, Februari 2018

Kepala Dinas,

TEMAWISMAN,S.PI

Pembina Tk. I

NIP. 19681021 199903 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2017	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	25
2.4. Permasalahan Yang dihadapi	28
2.5. Hambatan dan Kendala	29
2.6. Upaya Pemecahan Masalah	29
2.7. Tantangan dan Peluang	30
III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	32
3.2. Program dan Kegiatan	33
IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selam tahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak

cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi dan arahan menteri Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Jambi, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah.
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah :

- a. Untuk menjabarkan rencana pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016. Dengan demikian keterkaitan antara Rencana Anggaran dan Penyusunan Anggaran dapat terjaga sehingga terwujudnya Anggaran berbasis Kinerja dalam suatu OPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2016-2021)
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

1.4.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.4.1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.4.1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4.1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4.1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2018, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

1.4.1.5 Analisis Kinerja OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

1.4.1.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja OPD,
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*),
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja OPD,
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1.4.2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.4.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

1.4.2.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

1.4.3 Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2017 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	% Capaian
Konsumsi ikan perkapita (kg/perkapita/thn)	38,57	35,40	91,8
Produksi Perikanan (ton)	118.219	100.998,15	85,4
Perikanan tangkap (ton)	60.979	51.307,66	84,1
Perikanan Budidaya (ton)	57.240	49.690,53	86,8
Produk Olahan (ton)	4.170	4.080,86	97,9
Produksi Benih (ekor)	212.000.000	130.763.680	61,7
Restocking Ikan (ekor)	400.000	350.000	87,5
Suaka Perikanan (suaka)	206	287	139,3
Jumlah UPI (unit)	1.198	1.104	92,2
POKMAS WAS (kelompok)	52	49	94,2
Rumah Tangga Perikanan (RTP)	36.536	36.643	100,3
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap	12.331	12.017	97,5
Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya	24.205	24.626	101,7

*realisasi sementara

1). Indikator kinerja Konsumsi ikan perkapita.

Capaian konsumsi ikan perkapita tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2. berikut :

Tabel 2. Capaian konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	38,57	35,40	91,8

*realisasi sementara

Dari tabel 2 terlihat capaian kinerja pada indikator kinerja konsumsi ikan perkapita tahun 2017 dari target 38,57 kg/kapita/tahun dengan realisasi sebesar 35,40 kg/kapita/tahun atau sebesar 91,78 %. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan berbagai kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, dan lain sebagainya.

2). Indikator Produksi Perikanan

2.1) Produksi perikanan tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3. berikut :

Tabel 3. Capaian Produksi perikanan tangkap tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	60.979	51.307,66	84,1

*Realisasi sementara

Dari tabel 3 terlihat indikator produksi tangkap dari target 60.979 ton pertahun dengan realisasi 51.307,66 ton pertahun atau sebesar 84,14%. Produksi perikanan tangkap tersebut mencakup produksi tangkapan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum, Capaian produksi perikanan tangkap ini didukung oleh Program Pengembangan perikanan tangkap.

2.2) Produksi perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan yang berasal dari aktifitas budidaya ikan tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 4. berikut :

Tabel 4. Capaian Produksi perikanan budidaya tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	57.240	49.690,53	86,8

*Realisasi sementara

Dari table 4 terlihat Indikator produksi perikanan budidaya ini dari target produksi 57.240 ton dengan realisasi sebesar 49.690,53 ton atau sebesar 86,81 %. Produksi perikanan budidaya ini berasal dari produksi ikan di tambak/air payau, budidaya ikan dikolam, budidaya ikan di keramba/KJA dan budidaya minapadi. Dukungan terhadap capaian indikator ini dilakukan melalui Program Pengembangan Perikanan Budidaya. Kurang maksimalnya capaian produksi ini salah satu faktor penyebab yaitu tingginya harga pakan pabrik, sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional pembudidaya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil produksi budidaya ikan.

3) Produk Olahan

Capaian produk olahan hasil perikanan yang berasal dari aktifitas pengolahan tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 5. berikut :

Tabel 5. Capaian Produksi produk olahan tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Produksi Produk Olahan (ton)	4.170	4.080,86	97,9

*Realisasi sementara

Dari tabel 5 terlihat Indikator produksi produk olahan ini dari target produksi 4.170 ton dengan realisasi sebesar 4.080,86 ton atau sebesar 97,86 %. Produksi produk olahan ini berasal dari produksi unit pengolahan ikan yang berada di Provinsi Jambi. Dukungan terhadap capaian indikator ini dilakukan

melalui Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

4). Indikator Jumlah Produksi Benih Ikan

Capaian produksi benih ikan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 6. berikut :

Tabel 6. Capaian jumlah produksi benih ikan tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Produksi Benih ikan (ekor)	212.000.000	130.763.680	61,7

*Realisasi sementara

Dari tabel 6 tersebut terlihat untuk indikator produksi benih ikan dari target kinerja sebesar 212.000.000 ekor, realisasi sebanyak 130.763.680 ekor atau sebesar 61,91 %. Capaian program ini didukung oleh Program pengembangan Perikanan Budidaya dengan kegiatan pengembangan pembenihan ikan komersil, kegiatan pengembangan UPTD BBIS Kerinci serta pengembangan sumberdaya manusia perikanan budidaya.

5). Indikator Jumlah Restocking ikan

Capaian jumlah restocking ikan diperairan umum tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Capaian jumlah restocking ikan tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Restocking ikan (ekor)	400.000	350.000	87,5

*Realisasi sementara

Dari tabel 7 diatas terlihat capaian jumlah restocking ikan tahun 2017 dari target 400.000 ekor terealisasi sebanyak 350.000 ekor atau sebesar 87,50 %. Indikator ini didukung oleh Kegiatan Perlindungan dan Koservasi Sumberdaya Alam dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

6). Indikator Jumlah Suaka Perikanan

Capaian jumlah suaka perikanan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Capaian jumlah suaka perikanan tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Suaka Perikanan (lokasi)	206	287	139,3

*Realisasi sementara

Dari tabel 8 terlihat Indikator Suaka perikanan dari target 206 suaka, pada tahun 2017 realisasi sebanyak 287 suaka atau sebesar 139,32%. Disini terlihat capaian kinerja untuk lokasi suaka perikanan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini karena besarnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat untuk menjaga kelestarian alam melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir.

7). Indikator Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Capaian jumlah Unit Pengolahan Ikan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Capaian jumlah UPI tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
Unit Pengolahan Ikan (UPI)	1,198	1.104	92,2

*Realisasi sementara

Dari tabel 8 terlihat indikator Jumlah Unit Pengolahan Ikan dari target 1.198 UPI realisasi sebanyak 1.104 UPI atau sebesar 92,2 %. Indikator ini didukung oleh Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pengembangan sistem informasi pasar, pengembangan unit pengolahan ikan dan pembinaan mutu hasil perikanan.

8). Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Capaian jumlah POKMASWAS tahun 2017 dapat dilihat pada table 9 berikut :

Tabel Capaian jumlah POKMASWAS tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
POKMASWAS	52	49	94,2

*Realisasi sementara

Dari tabel 9 terlihat untuk indikator POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) dari target 52 kelompok realisasi sebanyak 49 Kelompok atau sebesar 94,2 %. POKMASWAS ini merupakan kelompok masyarakat yang mengawasi kelestarian SDA khususnya sumber daya ikan di perairan umum dan laut agar terhindar dari pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga SDI akan terus terjaga dan lestari. Guna mendukung capaian indikator ini dilakukan melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir dengan kegiatan pengawasan terpadu penangkapan ikan.

9). Indikator Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Capaian jumlah RTP tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Capaian jumlah RTP tahun 2017

Indikator	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1. Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap	12.331	12.017	97,5
2. Rumah tangga Perikanan (RTP) budidaya	24.205	24.626	101,7

*Realisasi sementara

Dari tabel 10 terlihat Indikator penyerapan tenaga kerja dimana Rumah Tangga Perikanan (RTP) baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya dari target 36.536 RTP realisasi sebanyak 36.643 RTP atau sebesar 100,29%. Jumlah RTP ini berasal dari RTP Tangkap dilaut dan perairan

umum, dan RTP budidaya ikan di kolam, keramba dan Japung (KJA), usaha tambak, dan usaha budidaya minapadi.

Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan beberapa tahun terakhir.

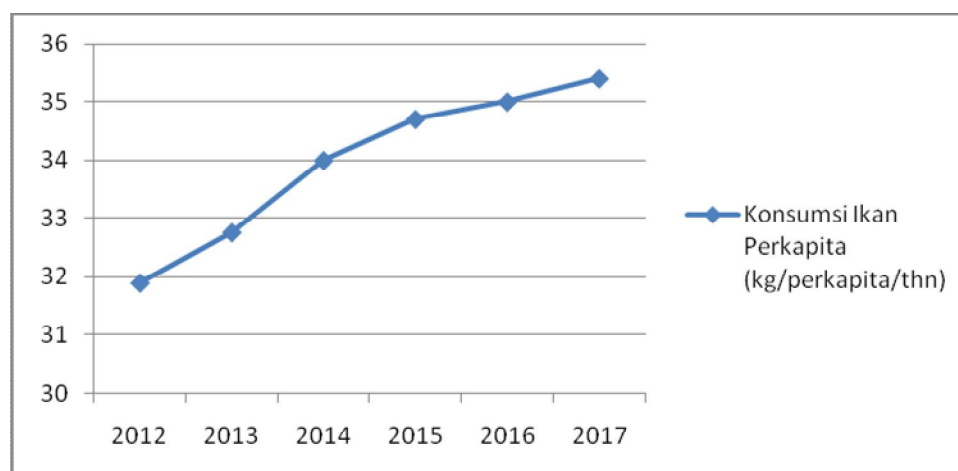
1). Indikator Konsumsi ikan perkapita

Capaian konsumsi ikan perkapita tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perkembangan konsumsi ikan perkapita (kg/kap/thn) tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Konsumsi Ikan Perkapita (kg/perkapita/thn)	31.9	32.76	34.0	34.7	35.0	35.4	2,1

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik terlihat pada tahun 2012 menunjukkan angka 31,9 kg/kapita/tahun, hingga tahun 2017 angka konsumsi ikan perkapita masyarakat provinsi Jambi mencapai 35,4 kg/perkapita/tahun atau terjadi peningkatan sebesar 2,1%. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi

pengolahan (diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, dan lain sebagainya.

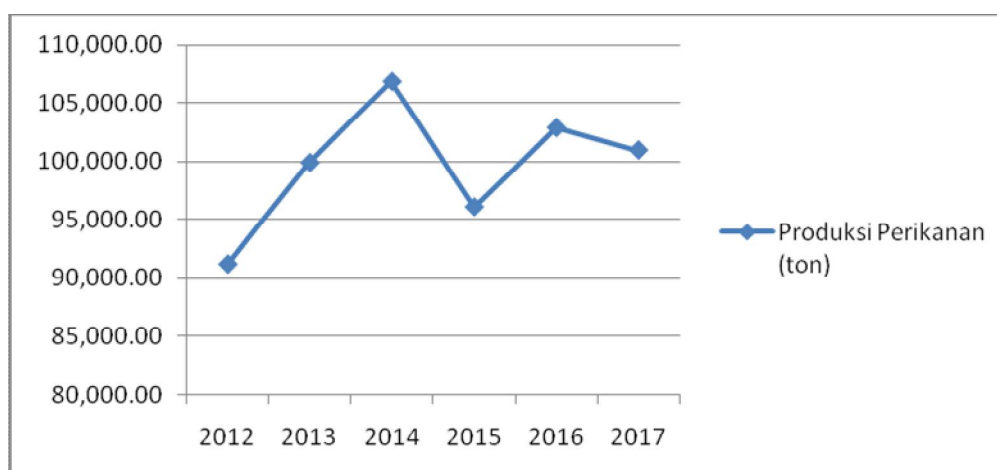
2). Indikator Produksi Perikanan

Capaian Produksi tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 12 Perkembangan Produksi Perikanan tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Produksi Perikanan (ton)	91,178.50	99,913.50	106,881.90	96,087.30	102,904.6	100,998.15	2,3

*angka sementara



Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan pada tahun 2012 sebesar 91,178.50 ton, angka ini terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi 106,881.90 ton namun di tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 96,087.30 ton akan tetapi produksi kembali meningkat hingga pada tahun 2017 sebesar 100,998.15 ton. Penurunan produksi perikanan pada tahun 2017 berasal dari hasil produksi penangkapan dilaut dan perairan umum. Diberlakukannya undang-undang mengenai larangan penggunaan trawl mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, dimana banyak nelayan yang menggunakan trawl tidak melaut. Untuk itu pemerintah Provinsi sedang berupaya untuk mengganti alat tangkap trawl dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan

produksi budidaya dihasilkan dari usaha budidaya kolam, keramba, KJA, tambak dan minapadi. Turunnya produksi perikanan di tahun 2015 ini sebagai dampak kemarau panjang yang melanda Provinsi Jambi.

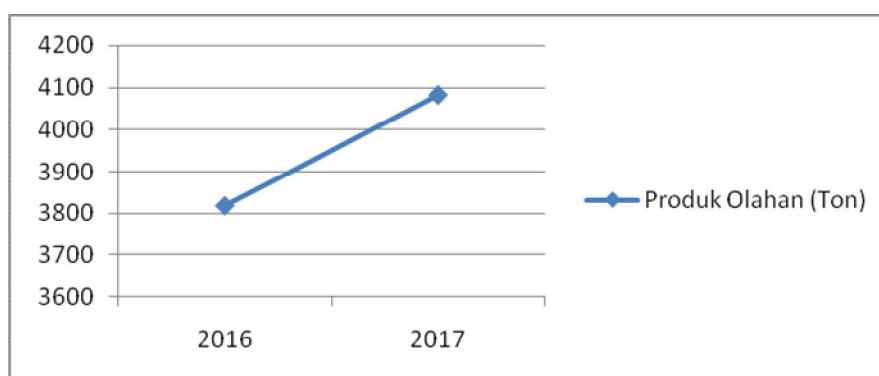
3). Indikator Produk Olahan

Jumlah Produk Olahan Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 13 dan Grafik Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2016 – 2017

Indikator	Capaian		Perkembangan (%)
	2016	2017*	
Produk olahan (ton)	3.818	4.080,86	6,9

*angka sementara



Dari Tabel dan grafik terlihat produk olahan di provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah 3.818 ton dan pada tahun 2017 meningkat 6,9% menjadi 4.080,86 ton, peningkatan ini menunjukkan adanya trend positif akan produk olahan hasil perikanan.

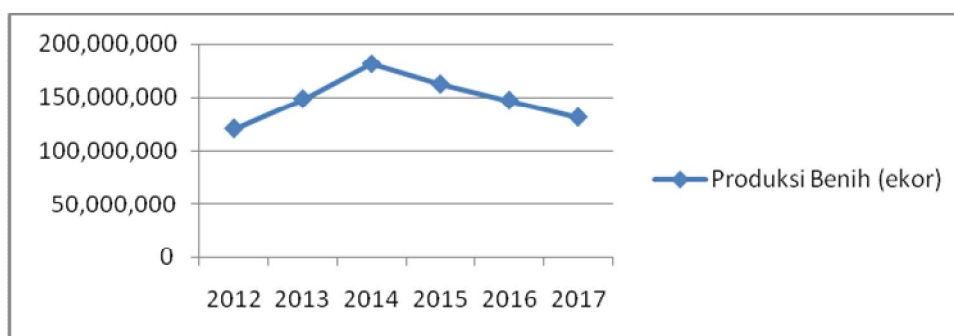
4). Indikator Jumlah Produksi Benih

Jumlah Produksi benih tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah produksi benih tahun 2011 – 2016

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Produksi Benih (ekor)	120.288.991	148.078.300	181.115.757	161.908.800	146.697.000	130.763.680	2,9

*Realisasi sementara



Pada tabel dan grafik terlihat produksi benih ikan provinsi Jambi pada tahun 2012 sebesar 120.288.991 ekor terus meningkat hingga tahun 2014 mendi terjadi penurunan menjadi 181.115.757 ekor, akan tetapi pada tahun 2015 produksi sebanyak 161.908.800 ekor terus menurun hingga pada tahun tahun 2017 menjadi 130.763.680 ekor. Naik turunnya produksi benih ikan ini sejalan dengan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Benih ikan yang disebarkan kepada pembudidaya ikan di Provinsi Jambi berasal dari Balai Benih Ikan Sentral Kerinci, Balai Benih Ikan Lokal yang ada di tiap kab/kota, Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), Taman Anggrek, Balai Benih Ikan Thehok dan Balai Budidaya Air Tawar Jambi. Namun sifat produk perikanan ini sangat bergantung terhadap iklim dan cuaca.

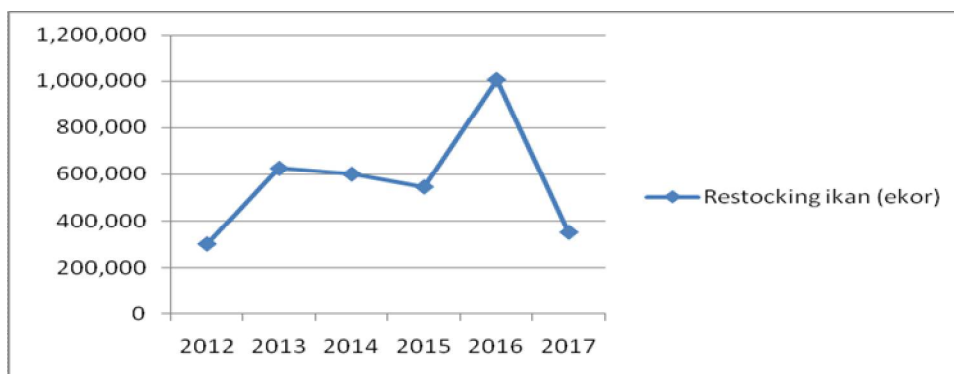
5). Indikator Restocking ikan

Jumlah Restocking ikan tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah Restocking ikan tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Restocking ikan (ekor)	300,000	625,000	600,000	545,000	1.005.000	350.000	22,9

*Realisasi sementara



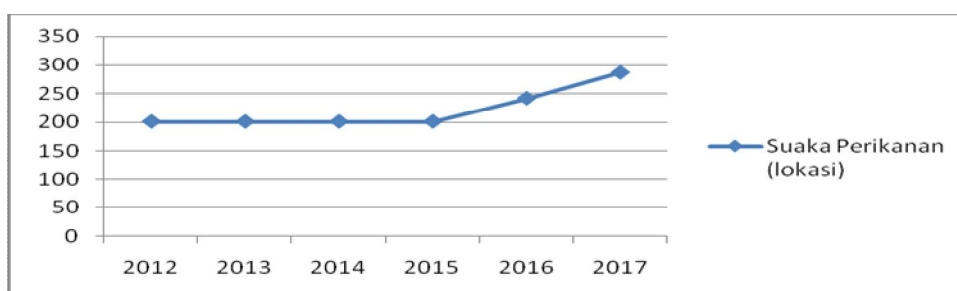
Dari table dan grafik terlihat jumlah restocking ikan diperairan umum pada tahun 2012 jumlah restocking ikan sebanyak 300.000 ekor dan pada tahun 2013 meningkat sebanyak 625.000 ekor, pada tahun 2014 restocking ikan sebanyak 600.000 ekor dan pada tahun 2015 sebanyak 545.000 ekor. Pada tahun 2016, jumlah restocking meningkat tajam sebanyak 1.005.000 ekor, dan di tahun 2017 sebanyak 350.000 ekor. Jumlah restocking ikan ini berfluktuasi, hal ini sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan. Lokasi restocking ini tersebar di semua suaka dan lubuk larangan yang ada di Provinsi Jambi.

6). Indikator Jumlah Suaka Perikanan

Jumlah Suaka Perikanan tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah Suaka Perikanan/reservat dan lubuk larangan tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Suaka Perikanan (lokasi)	201	201	201	201	242	287	7,8



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah suaka perikanan/reservat dan lubuk larangan di Provinsi Jambi pada tahun 2012 sebanyak 201 suaka perikanan dan lubuk larangan, dan pada tahun 2015 jumlah suaka perikanan tetap sebanyak 201 suaka dan lubuk larangan. Pada tahun 2016, jumlah suaka perikanan meningkat 242 suaka dan lubuk larangan dan meningkat lagi di tahun 2017 sehingga menjadi 287 suaka dan lubuk larangan. Penetapan suaka/Reservat ikan merupakan keharusan dalam rangka pelestarian sumber daya alam di Perairan Provinsi Jambi di mana perairannya sudah mendekati kritis. Disamping itu pembangunan reservat juga diperlukan dalam upaya menjamin kelangsungan hidup ikan, juga berpengaruh terhadap peningkatan Produksi suatu Perairan. Reservat dapat dibangun/didirikan pada wilayah pemijahan ikan (zona inti) maupun wilayah anaknya (zona penyangga), untuk dapat melindungi induk ikan yang akan memijah serta anak-anak ikan dari kelangsungan hidupnya.

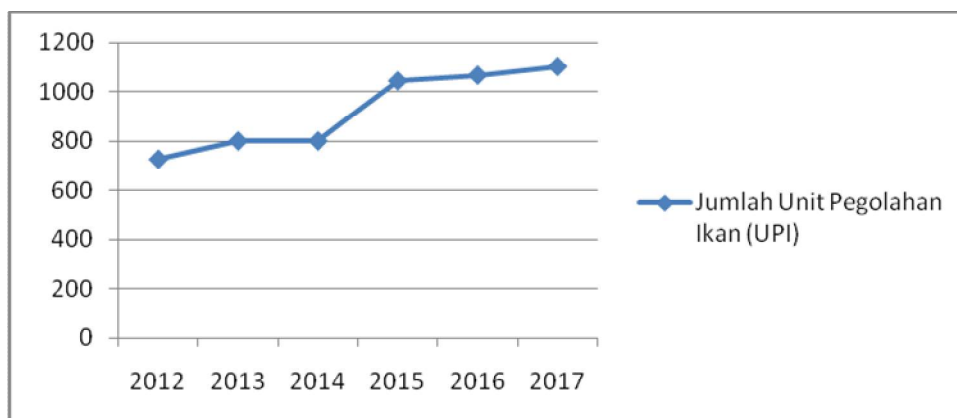
7). Indikator Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah UPI tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	726	800	800	1.045	1.068	1.104	9,3

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah Unit Pengolahan Ikan pada tahun 2012 sebanyak 726 UPI hingga tahun 2016 jumlah UPI meningkat menjadi 1.068 UPI dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 1.104 UPI, atau terjadi rata-rata peningkatan sebesar 9,3% pertahun. UPI ini merupakan sentra pengolahan yang pusat kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM/ UKM) di kawasan/lokasi tertentu dalam wadah kelembagaan usaha bersama. Di Provinsi Jambi lokasi kegiatan sentra pengolahan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, dengan bermacam produk olahan seperti terasi, kerupuk, Abon Ikan, ikan salai dan lain sebagainya.

Untuk memacu perkembangan kegiatan pengolahan di Sentra pengolahan hasil perikanan berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diantaranya Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan, bantuan peralatan pengolahan dan bimbingan teknis pengolahan ikan.

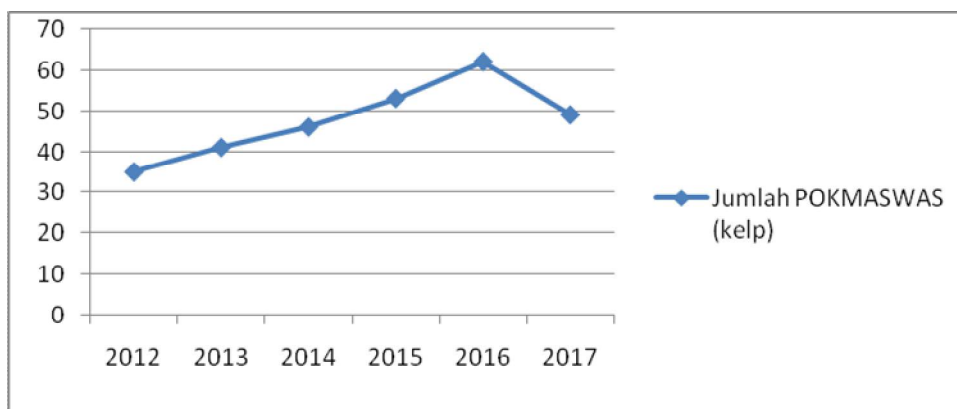
8). Indikator Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Jumlah POKMASWAS tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah POKMASWAS tahun 2011 – 2016

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	
Jumlah POKMASWAS (kelp)	35	41	46	53	62	49	8,1

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik terlihat jumlah kelompok masyarakat pengawas perikanan pada tahun 2012 sebanyak 35 kelompok, hingga tahun 2017 bertambah menjadi 49 kelompok atau meningkat sebesar 8,1 % pertahun. POKMASWAS ini merupakan kelompok masyarakat yang mengawasi kelestarian SDA khususnya sumber daya ikan di perairan umum dan laut agar terhindar dari pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga SDI akan terus terjaga dan lestari.

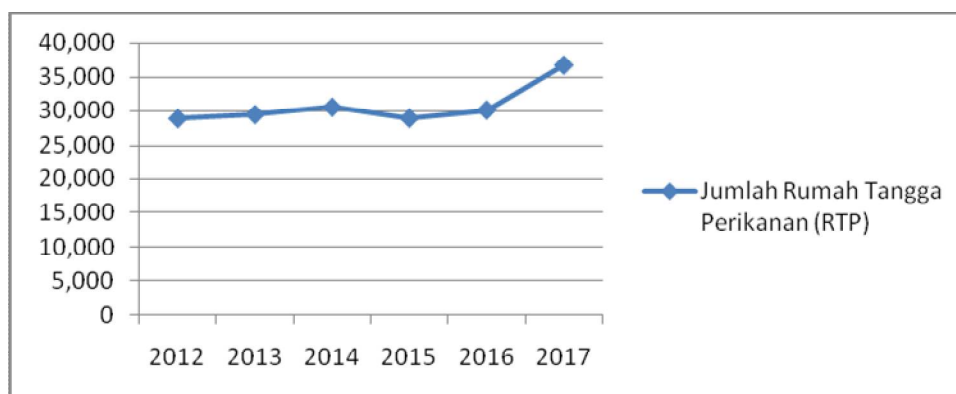
9). Indikator Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) tahun 2012 - 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel dan Grafik Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Perikanan tahun 2012 – 2017

Indikator	Capaian						Perkembangan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	28,845	29,436	30,503	28,902	30,078	36,643	5.3

*Realisasi sementara



Dari tabel dan grafik terlihat Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 rumah tangga perikanan/nelayan secara umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 RTP/nelayan berjumlah 28,845 RTP, kondisi ini terus meningkat sampai tahun 2014 berjumlah 30.503 RTP, namun di Tahun 2015 turun menjadi 28.902 RTP dan meningkat lagi di tahun 2016 hingga pada tahun 2017 menjadi 36.643 RTP. Perkembangan jumlah RTP/nelayan ini jika dirata-ratakan terjadi peningkatan rata-rata 5,3 % setiap tahunnya. Peningkatan jumlah RTP/Nelayan ini menandakan semakin banyaknya penyerapan tenaga kerja dibidang perikanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tersebut diatas, tergambar dalam penyerapan APBD (Fisik 75,59%, keuangan 70,68 %). Adapun permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Program dalam Bidang Sekretariat:

Tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dari 5 Program yang dimiliki dalam bidang sekretariat, baik itu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hingga program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

➤ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Permasalahan utama dalam mensukseskan program ini yaitu semakin maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunnya produksi SDI, solusinya yaitu dengan meningkatkan upaya bersama dari pihak terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kelestarian alam.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumber daya ikan, sehingga perlu meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, khususnya dengan mengembangkan dan meningkatkan lagi potensi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

➤ **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khususnya kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA). Di samping itu besarnya pengaruh musim kemarau panjang terhadap kualitas air. Solusinya adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi.

➤ **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, yaitu Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT. Solusinya yaitu dengan memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas.

Selain itu, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah masih adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang tidak ramah lingkungan di wilayah perairan Provinsi Jambi. Solusinya yaitu dengan secara bertahap membina dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 tahun 2015 tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" kepada para nelayan, serta secara berangsur-angsur mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

tersebut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Namun, jikalau nelayan atau pelaku pelanggaran penangkapan ikan masih terindikasi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

➤ **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta) dan masih kurangnya dukungan lintas sektor untuk pembangunan industri pengolahan terpadu sehingga menyulitkan bagi para pedagang, untuk memenuhi permintaan pasar. Solusinya yaitu menempuh upaya penguatan akses permodalan melalui MoU dengan bank Indonesia, pembentukan LKM dan mendorong petani untuk menggunakan skim kredit, KUR dan KKPE.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Pengembangan Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap yang terkandung di Provinsi Jambi sekitar 114.000 ton/tahun dengan potensi lestari (*maximum sustainable yield-MSY*) sekitar 71.820 ton/thn, yang mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang cukup besar ± 177 jenis ikan konsumsi dan 38 jenis ikan hias yang sebagian besar merupakan komoditas ekspor dan merupakan potensi plasma nutfah, namun kondisi ini tidak diimbangi ketersediaan SDM nelayan/petani yang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Disamping itu keterbatasan armada penangkapan yang digunakan nelayan penangkap ikan yang umumnya berukuran di bawah 30 GT. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat pemanfaatan sumberdaya yang ada, kondisi ini lebih memprihatinkan dengan adanya penangkapan ikan yang kurang bertanggung jawab (*illegal fishing*) dengan menggunakan alat dan bahan terlarang yang digunakan oleh kapal dari Provinsi tetangga maupun kapal asing.

b. Pengembangan Perikanan Budidaya

Luas perairan umum (berupa sungai, danau, rawa) di Provinsi Jambi ±115.000 ha dengan potensi sebagai lahan usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 115.000 unit. Wilayah pesisir Pantai Timur Jambi seluas ±18.000 Ha merupakan lahan yang potensial bagi pengembangan budidaya air payau. Pada tahun 2017 telah dimanfaatkan seluas 311,93 Ha. Tingkat pemanfaatan yang baru mencapai 1,7% tersebut disebabkan oleh sulitnya memperoleh air dengan salinitas tinggi, sehingga kurang efisien bagi pengembangan komoditas perikanan air payau dan produktifitasnya masih rendah. Lahan potensial bagi pengembangan budidaya kolam kurang lebih seluas 100.700 unit, dan pemanfaatannya tahun 2017 baru 42.620 Unit, tingkat pemanfaatannya 45,3%. Jenis kolam yang dikembangkan umumnya disesuaikan dengan kondisi geografis lahan. Di daerah dataran tinggi dikembangkan kolam air deras (running water), sedangkan di dataran rendah dikembangkan kolam-dalam (deep pond).

Kontribusi perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah sebesar 49.690,5 ton dari total produksi 100.998,2 ton atau sebesar 49,2 %. Dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi, maka sinergitas di antara berbagai kegiatan perlu ditingkatkan, seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang berkaitan dengan pengolahan/ pemasaran hasil diharapkan dapat meningkat seiring sasaran produksi dan produktifitas yang ditetapkan.

c. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pembangunan sektor perikanan yang diupayakan seoptimal mungkin di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan dengan meningkatnya produksi dan ekspor hasil perikanan dan kemajuan dalam pengolahan produk usaha perikanan. Kecenderungan kebutuhan konsumsi ikan yang semakin meningkat di Provinsi Jambi dan sekitarnya dibarengi oleh kebutuhan penanganan/ pengolahan dan pemasaran yang makin baik. Peningkatan usaha dalam penangkapan dan budidaya ikan perlu dibarengi dengan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Hal ini tampak dari pengembangan sektor perikanan di Provinsi Jambi yang terhambat oleh kondisi timpang dimana nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Jambi umumnya belum memiliki akses langsung terhadap institusi pemasaran, demikian juga terhadap unit pengolahan. Disamping itu masalah kualitas dan keamanan produk seperti isu formalin dan pencemaran air akibat limbah sedikit banyak mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan produk perikanan.

Memperhatikan kondisi tersebut maka di Provinsi Jambi perlu ditingkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan dalam aspek kualitas, kuantitas dan keragaman dari unit-unit usaha tersebut. Dengan demikian dapat diharapkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dapat berjalanimbang dengan peningkatan dalam usaha penangkapan dan budidaya ikan.

d. Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jambi memerlukan pengelolaan yang tangguh, karena sejalan dengan perkembangan pembangunan, wilayah pesisir telah mengalami tekanan yang cukup berat, dan secara signifikan telah terjadi eskalasi degradasi yang cukup memprihatinkan. Kecenderungan meningkatnya degradasi lingkungan pesisir dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain ditandai dengan meningkatnya kerusakan mangrove, abrasi pesisir pantai, terumbu karang dan siltasi/delta, serta perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dan erosi dari hulu sungai akibat penggundulan hutan. Belakangan ini kerusakan pesisir dan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga diakibatkan oleh peningkatan aktifitas nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan racun dan listrik.

Untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan pengembangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian untuk memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dimungkinkan diterapkannya strategi yang diintegrasikan dalam pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management

(ICZM) yakni pemanfaatan wilayah dalam batas kewajaran yang berkomitmen pada perlindungan dan konservasi wilayah pesisir.

Gugus pulau kecil di Provinsi Jambi antara lain pulau-pulau kecil di muara sungai Berbak Kecamatan Nipah Panjang (Sungai Nipah Panjang; pulau Mudo, pulau Walambi, pulau Parang Kudo, pulau Telor dan Pulau Nyiri) yang merupakan pulau delta yang pembentukannya dari endapan sedimen.

Kawasan hutan mangrove di Provinsi Jambi, misalnya di kawasan Tungkal Ilir lebih kurang 21,5 km merupakan bagian dari 86 km panjang pantai pesisir timur Propinsi Jambi yang diprioritaskan sebagai kawasan cagar alam. Kawasan ini merupakan kawasan dibatasi oleh dataran lumpur yang mengarah ke tepi laut. Seluruh mangrove di pesisir timur ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan SK Menteri Pertanian No 507/KPTs/Um/6/1981.

2.4 Permasalahan Yang dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih rendah, karena :
 - a. Terbatasnya kemampuan SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi.
 - b. Masih sulitnya mengakses sumber permodalan bagi nelayan/pembudidaya.
 - c. Masih rendahnya minat investor di sektor kelautan dan perikanan.
2. Tingginya sifat ketergantungan produk perikanan terhadap cuaca, seperti bencana asap dan musim kemarau panjang yang mengakibatkan keringnya kolam masyarakat sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pembudidayaan ikan, serta jarak pandang yang mengganggu nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut dan perairan umum.

3. Pemilikan sarana penangkapan ikan nelayan hampir 80 % sarana penangkapan ikan tradisional dengan ukuran kapal < 5 GT.
4. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
5. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran dan belum melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan benar sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan hasil usaha belum maksimal.
6. Tingginya biaya produksi ikan akibat mahalnya harga pakan yang didatangkan dari luar daerah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
7. Belum adanya Asosiasi yang dapat memfasilitasi perdagangan langsung untuk negara tujuan ekspor (ekspor ikan hias dan udang hidup masih melalui Jakarta)
8. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk jalan produksi, saluran irigasi, energi listrik (PLN) di kawasan unit pengolahan ikan.
9. Masih adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dan industri tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan perairan, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan produksi sumberdaya ikan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dibidang Perikanan, sehingga masih ditemukan pelanggaran dibidang penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak kelestarian sumberdaya ikan

2.5 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam tahun 2017 antara lain masih terbatasnya sumberdaya manusia yang menangani bidang perikanan sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan belum maksimal.

2.6 Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya dengan mengembangkan potensi masyarakat melalui Pokmaswas.
2. Mengembangkan pola usaha budidaya dengan pendekatan kawasan, sehingga mudah dalam pembinaan maupun penyiapan sarana pendukungnya.
3. Melakukan rekrutmen tenaga teknis/sarjana kelautan dan perikanan, khususnya untuk tenaga di lapangan serta untuk tenaga pendamping paket yang diberikan langsung kepada nelayan atau pembudidaya ikan.
4. Melaksanakan sosialisasi Cara Budidaya Ikan (CBIB) yang baik dan benar.
5. Mengembangkan pola pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap melalui pembiayaan dana APBD, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).
7. Menempuh upaya fasilitasi akses sumber modal bagi nelayan/ pembudidaya ikan melalui KKMB dan program lainnya.

2.5 Tantangan dan Peluang

1. Tantangan Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Jambi masih terbatas di perairan pantai mengingat kemampuan armada penangkapan yang didominasi oleh kapal berkekuatan kecil dan sedang, yakni kapal/perahu bertonase di bawah 10 GT. Di samping itu pengelolaan sumberdaya kelautan masih menghadapi tantangan adanya pencurian ikan (*illegal fishing*) dan pelanggaran lain dalam penangkapan ikan (*unregulated and unreported fishing*). Kurangnya sarana dan alat penegakan hukum, jumlah dan kapasitas

petugas pengawas, serta rendahnya koordinasi antar instansi mengakibatkan tingkat pencurian ikan belum teratasi.

Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang hampir punah. Dalam perairan umum Provinsi Jambi terdapat 235 jenis ikan, yang beberapa diantaranya sudah mulai tidak ditemui seperti ikan Ridik Angus dan Kurau Jenggot serta beberapa spesies ikan yang terancam punah seperti Ringo, Belido, Arwana, Udang Galah, Belida, Patin, dalung, dll.

2. Tantangan Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya ditargetkan mencapai peningkatan sekitar 30 % per tahun. Hal ini merupakan tantangan yang besar untuk menyelesaikan permasalahan di sektor hulu, in-proses dan hilir.


Di sektor hulu, dalam hal penyediaan pakan dan benih masih terdapatnya benih yang bermutu rendah dan mahal nya harga pakan pabrikan. Di dalam proses budidaya tantangan berupa masih lemahnya kemampuan teknis sebagian pembudidaya pemula, sehingga efisiensi usaha untuk meningkatkan keuntungan belum tercapai. Di sektor hilir terutama belum terbukanya pasar ekspor dan terbatasnya pasar regional, sehingga produk budidaya umumnya masih bertumpuk di pasar lokal yang menyebabkan rendahnya produktifitas pembudidaya.

3. Tantangan Pemasaran dan Pengolahan Ikan

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Provinsi Jambi menghadapi tantangan belum terkuasainya teknologi pengolahan hasil perikanan skala besar.

4. Tantangan Pelestarian Sumberdaya Ikan

Provinsi Jambi memiliki 235 jenis ikan lokal yang sebagian kecil diantaranya sudah sulit ditemukan seperti ikan Ridik Angus dan Kurau Jenggot serta beberapa spesies ikan yang terancam punah seperti Ringo, Belido, Arwana dan Belida. Untuk mempertahankan populasi dan jenis-jenis



ikan spesifik lokal di perairan umum tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan beserta dinas yang menangani perikanan di kabupaten/kota. Upaya penyadaran hukum dan pelestarian bersama dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

BAB 3

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun untuk satu tahun anggaran. Seiring adanya perubahan/revisi Rencana strategis pada tahun 2018, maka rencana kerja tahun 2019 mengalami perubahan mengikuti perubahan/revisi rencana strategis tersebut. Capaian kinerja OPD yang dinilai melalui beberapa indikator seperti standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan indikator sasaran sesuai dengan ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD yaitu sebagai berikut :

Tabel Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
				2019
1.	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Meningkatnya kawasan yang terlindungi 2. Meningkatnya populasi ikan lokal jambi	Jumlah reservat Jumlah benih ikan lokal yang ditebar di perairan (ekor)	25 280.000
2.	Terwujudnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan fungsinya	Meningkatnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan	Jumlah rekomendasi dokumen perizinan (dokumen)	2
3.	Meningkatkan produksi perikanan	1. Meningkatnya Produksi perikanan 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha perikanan	Produksi perikanan (Ton) Jumlah kelompok usaha perikanan yang berbadan hukum dan bersertifikasi	129.422 64 Kelompok
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir	1. Memperluas akses lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir 2. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah masyarakat pesisir dilatih (Orang) 1. NTN 2. NTPi	80 111,62 95,86
5.	Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan	Meningkatnya mutu produk hasil perikanan	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan	23

6.	Meningkatkan konsumsi ikan per kapita	Meningkatnya konsumsi ikan per Kapita	(SKP) Angka konsumsi ikan per kapita (Kg/Kapita/thn)	37,00
7.	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	Persentase tingkat kepatuhan (%)	76

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan pada tahun ke III sehingga rencana program dan kegiatan pada Dinas kelautan dan perikanan provinsi Jambi merevisi beberapa Program dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang meliputi :

1. Program Pengawasan SDKP, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu : Jumlah Reservat yang meningkat di 11 kabupaten/kota sebanyak 25 lokasi.

b. Kegiatan pengembangan kawasan pesisir.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu : Jumlah Desa masyarakat pesisir yang dilatih sebanyak 80 orang di Kabupaten Tanjung Jabung barat dan Tanjung Jabung Timur.

c. Kegiatan pengawasan terpadu penangkapan ikan

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu : Jumlah pengawasan terpadu perikanan sebanyak 36 kali. kegiatannya antara lain Pengawasan IUU Fishing, Pengawasan Perairan Umum, Pengawasan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, Pembinaan dan Penyuluhan POKMASWAS, sarana dan prasarana Pokmaswas, Peningkatan SDM Pengawas, Operasional kapal Pengawas, Manajemen Perkantoran dan pendampingan.

d. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut

Indikator kinerja ini yaitu Jumlah dokumen zonasi sebanyak 1 dokumen.

e. Kegiatan Pengelolaan instalasi pendung semurup kerinci

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu jumlah produksi benih ikan lokal (Semah, medik, betok) sebanyak 250.000 ekor.

f. Kegiatan Pengelolaan instalasi thehok

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu jumlah produksi benih ikan lokal sebanyak 475.000 ekor

2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Indikator Kinerja

Kegiatan yaitu Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi sebanyak 30 sampel.

b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi sebanyak 35 Kelompok.

c. Kegiatan Pengembangan Teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya.

Indikator Kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar sebanyak 10 jenis.

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah kapal yang mendarat di PPP kuala tungkal sebanyak 3.300 unit kapal

- b. Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap Indikator kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari alat tangkap yang tersedia sebesar 65.108 ton di 11 Kab/Kota
- c. Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Keterampilan Usaha Penangkapan Ikan sebanyak 5 kali di Provinsi Jambi.
- d. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah pelatihan keterampilan usaha perikanan tangkap sebanyak 5 kali.
- e. Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Nelayan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah bimtek teknologi perikanan tangkap sebanyak 4 kali.
- f. Kegiatan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Indikator Kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah kapal yang taat adminitrasi kesyahbandaran sebanyak 2.800 unit kapal.
- g. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan Instalasi PPI Nipah panjang Indikator kinerja kegiatan ini yaitu jumlah kapal yang mendarat di PPI nipah panjang sebanyak 100 unit.

4. Program Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Promosi dan Publikasi Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Promosi dan Publikasi Kegiatan Perikanan sebanyak 27 kali.
- b. Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah dokumen informasi pemasaran sebanyak 1 dokumen.
- c. Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Ikan (UPI) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah produksi UPI meningkat 4.693 Ton/tahun.

- d. Kegiatan pengelolaan Instalasi ikan hias taman telanaipura
Indikator kegiatan ini yaitu : Jumlah produksi benih ikan hias sebanyak 30.000 ekor.
- e. Kegiatan Pelayanan dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan di UPTD PMHP
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu : Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan sebanyak 20 sampel.
- f. Kegiatan penerapan mutu hasil perikanan di UPTD PMHP
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah penerapan mutu produk kelautan dan perikanan sebanyak 5 kali.
- g. Kegiatan pembinaan mutu
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen SKP yang diterbitkan sebanyak 23 dokumen.
- h. Kegiatan Pengembangan produk kelautan dan perikanan
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah ragam produk sebanyak 2 jenis.


BAB 4

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama satu tahun mendatang.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jambi, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif 2019.



LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	9	10	7	8	9	10
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Persentase pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>		100	1.550.028.300			100	1.646.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	Provinsi Jambi	12 Bulan	5.000.000	APBD	-	12 Bulan	1.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening	Provinsi Jambi	12 Bulan	580.250.000	APBD	-	12 Bulan	600.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Provinsi Jambi	35 orang	404.522.300	APBD	-	35 orang	415.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	40.000.000	APBD	-	12 Bulan	50.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Provinsi Jambi	44 jenis	64.963.000	APBD	-	44 jenis	70.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	8 jenis	41.230.000	APBD	-	8 jenis	50.000.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi Jambi	10 jenis	6.953.000	APBD	-	10 jenis	10.000.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Jambi	2 jenis	7.110.000	APBD	-	2 jenis	10.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan makan minum (bulan)	Provinsi Jambi	12 bulan	50.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordnasi dan konsultasi (bulan)	Dalam dan Luar Provinsi Jambi	12 bulan	350.000.000	APBD	-	12 bulan	380.000.000

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	1.659.700.000	APBD		100	1.720.000.000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Provinsi Jambi	5 jenis	47.500.000	APBD	-	5 jenis	55.000.000
2	Pengadaan Meubeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Provinsi Jambi	5 paket	99.600.000	APBD	-	5 paket	100.000.000
3	Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop, printer, UPS, gigastore	Provinsi Jambi	16 unit	107.500.000	APBD	-	16 unit	115.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Provinsi Jambi	12 bulan	100.000.000	APBD	-	12 bulan	110.000.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Provinsi Jambi	67 unit	530.100.000	APBD	-	67 unit	540.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Provinsi Jambi	3 paket	50.000.000	APBD	-	3 paket	60.000.000
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab sedang/berat	Provinsi Jambi	1 paket	160.000.000	APBD	-	1 paket	170.000.000
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat	Provinsi Jambi	4 paket	565.000.000	APBD	-	4 paket	570.000.000
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang disiplin		100	175.000.000			100	180.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Jambi	350 stel	175.000.000	APBD	-	360 stel	180.000.000
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur berkompentensi		100	412.656.700			100	430.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dalam dan Luar Provinsi Jambi	12 bulan	155.000.000	APBD	-	12 bulan	160.000.000

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Provinsi Jambi	1 kali	52.648.000	APBD	-	1 kali	55.000.000
3	Penatausahaan Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kepegawaian	Provinsi Jambi	1 kali	153.787.200	APBD	-	1 kali	160.000.000
4	Penatausahaan Kearsipan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan kersipan	Provinsi Jambi	1 kali	51.221.500	APBD	-	1 kali	55.000.000
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	1.468.921.650			100	1.480.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Jambi	7 jenis	236.484.900	APBD	-	7 jenis	240.000.000
2	Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Statistik	Jumlah laporan data statistik perikanan yang tersedia	Provinsi Jambi	4 kali	549.941.400	APBD	-	4 kali	550.000.000
3	Rancangan Penyusunan Program, Anggaran dan Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen rancangan penyusunan program anggaran kegiatan	Provinsi Jambi	1 kali	376.705.100	APBD	-	1 kali	380.000.000
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan program kegiatan	Provinsi Jambi	1 kali	138.937.000	APBD	-	1 kali	140.000.000
5	Inventarisasi dan Penertiban Aset	Jumlah dokumen aset yang diinventarisir	Provinsi Jambi	2 dokumen	166.853.250	APBD	-	2 dokumen	170.000.000
F	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP), Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Peningkatan kawasan yang lestari dan terlindungi		25 lokasi	5.486.288.000	APBD		25 lokasi	5.510.000.000
1	Kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah reservat meningkat	11 Kab/Kota	25 lokasi	1.362.797.900	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	26 lokasi	1.370.000.000

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
2	Kegiatan pengembangan kawasan pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang dilatih	Kab. Tanjab barat, Kab. Tanjab timur	80 Orang	290.567.500	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	100 Orang	300.000.000
3	Kegiatan Pengawasan Terpadu penangkapan ikan	Jumlah pengawasan terpadu perikanan	11 Kab/Kota	36 kali	1.531.661.700	APBD	-	38 kali	1.535.000.000
4	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah dokumen zonasi	Kab. Tanjab barat, Kab. Tanjab timur	1 dokumen	503.252.500	APBD	-	1 dokumen	505.000.000
5	Kegiatan pengelolaan Instalasi Pendung Semurup Kerinci	Jumlah produksi benih ikan lokal (Semah, medik, betok)	Kab. Kerinci	250.000 ekor	1.123.742.900	APBD	Kegiatan baru	300.000 ekor	1.125.000.000
6	Kegiatan pengelolaan instalasi Thehok	Jumlah produksi benih ikan lokal	Kota jambi	475.000 ekor	674.265.500	APBD	Kegiatan baru	500.000 ekor	675.000.000
G	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produktivitas Perikanan Budidaya		25,9 ton/Ha/tahun	1.851.082.000	<i>APBD</i>		26,5 ton/Ha/tahun	1.870.000.000
1	Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah sampel hama penyakit ikan di kawasan sentra produksi	Seluruh perairan dalam wilayah Prov. Jambi	30 sampel	672.425.000	APBD	-	40 Sampel	680.000.000
2	Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah usaha perikanan yang bersertifikasi	Provinsi Jambi	35 Kelompok	515.330.000	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	40 kelompok	520.000.000
3	Kegiatan Pengembangan Teknologi dan mutu pakan perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang beredar sesuai standar	Provinsi Jambi	10 jenis	663.327.000	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	11 jenis	670.000.000

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
H	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap		14,9 ton/alat tangkap/tahun	10.621.358.300	APBD		15,2 ton/alat tangkap/tahun	10.655.000.000
1	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal	Jumlah kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal	Kab. Tanjab barat	3300 unit	1.208.321.300	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	3400 unit	1.210.000.000
2	Kegiatan pengembangan sarana perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari alat tangkap yang tersedia	11 Kab/Kota	65.108 ton	5.805.914.000	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	67.276 Ton	5.815.000.000
3	Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	Jumlah Keterampilan Usaha Penangkapan Ikan	2 Kabupaten	5 kali	350.064.000	APBD	-	5 kali	355.000.000
4	Kegiatan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal	Jumlah kapal yang taat administrasi kesyahbandaran	Kab. Tanjab barat	2.800 Unit	74.684.000	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	2.800 Unit	75.000.000
5	Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah bimtek teknologi perikanan tangkap	2 Kabupaten	4 kali	490.276.000	APBD	-	4 Kali	500.000.000
6	Kegiatan pengembangan dan pengelolaan instalasi PPI Nipah panjang	Jumlah kapal yang mendarat di PPI Nipah panjang	Kab. Tanjab timur	100 Unit	2.692.099.000	APBD	Kegiatan baru	100 unit	2.700.000.000
I	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Perkapita		37,00 Kg/kapita	5.118.194.300	APBD		38,00 Kg/kapita	5.140.000.000
1	Kegiatan Promosi dan Publikasi Kelautan dan perikanan	Jumlah promosi dan publikasi kegiatan perikanan	Provinsi Jambi dan Luar Provinsi	27 kali	1.436.633.500	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	28 Kali	1.440.000.000
2	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah dokumen informasi pemasaran	11 Kab/Kota	1 dokumen	433.250.000	APBD	-	1 dokumen	435.000.000
3	Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Ikan (UPI)	Jumlah produksi UPI	11 Kab/Kota	4.693 ton/thn	619.620.000	APBD	-	4.884 Ton/thn	620.000.000
4	Kegiatan pembinaan mutu	Jumlah Dokumen SKP	Provinsi Jambi	23 Dokumen	332.256.000	APBD	Kegiatan baru	25 Dokumen	335.000.000
5	Kegiatan pengelolaan instalasi ikan hias Telanaipura	Jumlah benih ikan hias	Kota jambi	30.000 ekor	1.000.339.100	APBD	Perubahan nomenklatur kegiatan	35.000 Ekor	1.005.000.000

No	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
6	Kegiatan pelayanan dan pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan di UPTD PMHP	Jumlah pengujian sampel mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Provinsi jambi	20 sampel	870.368.000	APBD	Kegiatan baru	21 sampel	875.000.000
7	Kegiatan penerapan mutu hasil perikanan di UPTD PMHP	Jumlah penerapan mutu produk kelautan dan perikanan	Provinsi jambi	5 Kali	253.407.700	APBD	Kegiatan baru	5 Kali	255.000.000
8	Kegiatan pengembangan produk kelautan dan perikanan	Jumlah ragam produk	Provinsi jambi	2 Jenis	172.320.000	APBD	Kegiatan baru	2 Jenis	175.000.000
JUMLAH					28.343.229.250				28.631.000.000

Jambi, Agustus 2018

**KEPALA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI**

TEMAWISMAN, S.Pi
NIP. 19681021 199903 1 002